

Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

Lina Ulfa Fitriani¹, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago
Universitas Mataram

Abstract

This research aims to determine the political phenomenon of money that occurs in the community, it is difficult to stop and become the habit or tradition of certain political candidates or contestants to the community ahead of Of the elections to get the most support and vote from the community. The purpose of research is to know the factors of the cause of money politics, how the process of occurrence in the community and the impact of the political practice of money for the community. The research uses a paradigm analysis of social behaviour with Exchange theory to explore the political phenomena of money that often occur in the community, and is supported by several theories and concepts supporting the theory of power, political participation and Political money. The research methods used in this study are qualitative. Research location in Sandik village, Batu Layar District, West Lombok. The informant in the study consisted of the community, the successful team of certain political candidates or contestants to other important figures within the village. Data collection techniques are conducted by conducting field observations, in-depth interviews and documentation on interviews and photo activities. The results show that (1) the factors that cause political money in the community are the influence of the economic limitations of society, low quality of public education, and weak supervision conducted. (2) The process of political money is carried out directly by a certain political candidate or contestant and carried out indirectly through the intermediaries of others in providing and distributing the politics of the money. (3) The impact of the political practice of money can be detrimental to the democratic order and can cause other new problems in society to the Government, thus carrying a negative impact that is long term.

Keywords : *Political Money, Elections, Legislative, Sandik Village West Lombok Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat, sangat sulit untuk dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang, bagaimana proses terjadinya di masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis paradigma perilaku sosial dengan teori pertukaran untuk menggali fenomena politik uang yang sering terjadi di masyarakat, dan didukung oleh beberapa teori dan konsep pendukung yaitu teori kekuasaan, partisipasi politik dan politik uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, tim sukses dari calon

¹ linaulfafitriani12@gmail.com

atau kontestan politik tertentu hingga tokoh-tokoh penting lainnya di dalam desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi berupa rekaman wawancara serta foto kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.

Kata Kunci : Politik Uang, Pemilu, Legislatif, Desa Sandik Lombok Barat

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8).

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Menurut Damsar dan Indrayani (2015 : 64) berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Harrold H. Kelly maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori

pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai makhluk yang rasional, memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternative, dengan pilihan mencerminkan cost and reward (biaya dan ganjaran) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. (Damsar, 2015 : 64)

Menggunakan teori pertukaran ini kita bisa melihat bahwa fenomena politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon legislatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punishment) yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.

Charles F. Andrain (1992) dalam Damsar (2015 : 72) mengungkapkan bahwa kekuasaan dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Mendapatkan kekuasaan, seseorang membutuhkan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang dan membantunya dalam mendapatkan kekuasaan tersebut, bahkan dengan sumber daya yang dimiliki seseorang bisa mendapatkan kekuasaan, dan mampu membuat orang lain tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkannya. Salah satu sumber daya yang bisa digunakan untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah sumber daya ekonomi, seperti yang dikatakan Charles F. Andrain dalam Damsar (2015 : 72) bahwa salah satu sumber daya kekuasaan adalah ekonomi, sebab dengan ekonomi seseorang akan mampu untuk melakukan berbagai usaha dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki tersebut untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dalam hal ini adalah kekuasaan.

Partisipasi politik menurut Ikhsan Dermawan (2014 : 32) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menggunakan hak pilih di dalam sebuah pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sebenarnya tidak boleh ikut terpengaruh dengan apapun yang bisa berdampak pada kehilangan hak mereka sebagai warga negara, termasuk ketika

memberikan hak suara hingga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang selama ini telah mereka pilih dan percaya.

Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28) politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik. Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, vote broker adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. Seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam Gustia (2015 : 30) praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan (Patrick J.Rimbing, 2015 : 6). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di daerah Lombok Barat, tepatnya di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu di dalam masyarakat atau pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek politik uang yang dilakukan, baik sebagai pelaku yang melakukan praktek politik uang maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari praktek politik uang tersebut. Informan yang merupakan sumber dari informasi adalah individu di dalam masyarakat atau pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek politik uang yang dilakukan baik sebagai pelaku yang melakukan praktek politik uang maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari

praktek politik uang yang dilakukan di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat menggunakan metode wawancara dan observasi langsung serta menggunakan data pendukung seperti buku dan literatur.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Terjadinya Politik Uang

Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politi dalam pemilu. Praktek politik uang tidak kan mudah untuk diceag dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sedniri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pla fikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktek politik uang ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.

Proses Terjadinya Politik Uang

Proses pemberian politik uang pada masyarakat, dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam memberikan praktek politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dengan berbagai macam modus, kemudian bentuk imbalan yang diberikan, hingga lokasi dan waktu pemberian politik uang, dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan pemilu.

Dampak Terjadinya Politik Uang

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. Dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri

Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber ekonomi tersebut, baik dengan cara yang positif hingga menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan. Teori pertukaran memiliki asumsi dimana setiap individu adalah makhluk yang rasional dan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari perilaku yang

hendak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat.

Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut.

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ananta Bagus Perdana, 2014, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang dilakukan para Calon Legislatif pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta*
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukamjati. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : Penerbit PolGov UGM.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Damsar, Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prendamedia Group. Hlm 72).
- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas
- Fajar Nugraha, 2014 *Pengaruh Implementasi Metode E-Voting sebagai Media Partisipasi Politik pada Pemilihan Ketua Osis di SMAN 1 Manonjaya Terhadap Peningkatan Civic Responsibility*
- Ikhsan Darmawan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas Mengutp Dalam “Christopher J. Anderson, Et.Al., Losers” *Consent : Election And Democratic Legitimacy*, Oxford : Oxford University Press, 2005, Hlm. 2
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Pers, Hlm 5. Dalam *Skripsi Pidana Gustia, Pelaku Criminal Dalam Money Politik*
- Kasiram, Muhammad. 2010. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UIN Maliki Press.
- Mage, Ruslan Ismail. 2013. *Berpolitik dengan Biaya Murah*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. *Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014 (suatu studi di dapil 1 kecamatan sario dan kecamatan malalayang)*
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer. George. 2014. *Teori Sosiologi Modern : Edisi Ketujuh*. Jakarta : Kencana
- Sarbani. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum (Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor 1 Januari 2015)*

Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

Susi Nuraeni, 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009